



**KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS REPUBLIK INDONESIA**

**NOTULEN RAPAT**

**Pembahasan Rencana Aksi Keterbukaan Pemerintah 2018-2020**

*Topik: Penyelenggaraan Forum Akuntabilitas Data Penerima Bantuan Iuran (PBI)*

**1. Pelaksanaan**

Hari/ Tanggal : Selasa, 14 Agustus 2018

Waktu : 10.00-11.30 WIB

Tempat : Ruang Rapat 204

**2. Pimpinan Rapat** : 1. Kasubdit Kualitas Pelayanan Publik,  
Kementerian PPN/Bappenas

**3. Peserta Rapat** :

1. Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial
2. Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial
3. Biro Perencanaan, Kementerian Sosial
4. Medialink
5. World Vision Indonesia
6. Sekretariat Open Government Indonesia

**4. Pembahasan Rapat**

1. Pertemuan bilateral hari dilakukan dalam rangka menindaklanjuti kegiatan Kick Off Rencana Aksi Keterbukaan Pemerintah 2018-2020 yang dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus 2018.
2. Rencana aksi OGI berupaya untuk menajamkan RKP dan Renja K/L;
3. Tujuan dari renaksi ini adalah ingin mendorong update data terpadu yang melibatkan masyarakat untuk memberikan verifikasi dan validasi.
4. Mekanisme terkait verifikasi yang partisipatif sudah terdapat dalam Permensos 28/2017 melalui musyawarah desa/ kelurahan/ atau nama lainnya.

5. Selain melalui musdes/ muskel, Kemensos juga memiliki beberapa platform yang dapat digunakan untuk mengupdate data yakni melalui SPM (sistem pengaduan masyarakat) dan call center.
6. Dengan tersedianya mekanisme kebijakan dan juga platform yang dikembangkan tersebut, maka indikasi usulan yaitu, (i) sosialisasi edukasi tentang mekanisme updating data, (ii) perencanaan untuk piloting dengan daerah program Kemensos.
7. Untuk mempertajam usulan tersebut Kementerian Sosial akan mengadakan rapat secara internal untuk mendiskusikan rencana aksi yang diusulkan.
8. Selanjutnya hasil pertemuan tersebut akan dituangkan dalam template untuk Renaksi OGI 2018-2020.

Notula Rapat

Tities Eka A.

**Ringkasan Hasil Pembahasan Usulan Aksi:**

Aksi : Pelaksanaan forum akuntabilitas data penerima bantuan iuran (PBI).

Latar Belakang :

Mekanisme proses verifikasi dan validasi data PBI sudah tersedia melalui Permensos 28/2017. Selain itu juga terdapat berbagai media komunikasi yang dapat digunakan, diantaranya musyawarah desa, musyawarah kelurahan maupun call center. Namun, mekanisme ini tidak banyak diketahui oleh masyarakat. Selain itu, perlu ada penguatan pada sisi pemerintah untuk terus pro aktif memberikan peningkatan kapasitas bagi masyarakat agar dapat memberikan informasi tersebut.

<b>Aksi</b>	<b>Sasaran Akhir</b>	<b>Indikator Capaian</b>	<b>Penanggung Jawab</b>	<b>K/L/D/I Terkait</b>
Penyelenggaraan Forum Akuntabilitas Data Penerima Bantuan Iuran (PBI)	Tersedianya data penerima bantuan iuran sesuai dengan hasil aspirasi masyarakat	1. Terlaksananya sosialisasi edukasi tentang mekanisme updating data PBI 2. Tersedianya daftar PBI yang diusulkan oleh masyarakat melalui musdes, muskel maupun platform lainnya	Kementerian Sosial	Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Kementerian Kesehatan